

Ketakterbatasan Martabat Manusia dan Ketimpangan Ekonomi: Tinjauan Etis berdasarkan *Dignitas Infinita*

Gabriel Dibya Panata Lumanto ^a

^a Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

¹ gabriel.dibya@gmail.com

Kata Kunci:

ketimpangan
ekonomi,
kemiskinan,
Dignitas Infinita,
martabat manusia.

Abstrak

Keadilan senantiasa berelasi erat dengan martabat manusia. Ketika penodaan terjadi, reaksi penolakan akan timbul dengan sendirinya. Fenomena kerusakan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 di beberapa tempat di Indonesia merupakan contoh nyata. Penderitaan rakyat jelata disandingkan dengan gaya hidup mewah dan pamer dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kenyataan ini amat menggenaskan. Dalam terang *Dignitas Infinita*, apa yang terjadi sungguh merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Martabat diberikan Tuhan dan melekat pada diri setiap orang tanpa kecuali. Status sosial dan jumlah harta tidak memberikan pengaruh. Apapun tidak dapat menghapusnya. Kebijakan pemerintah, yang malahan mengakibatkan kemiskinan, adalah bukti yang tidak terelakkan. *Flexing* aparat pemerintahan menunjukkan uang lebih dihormati dan disanjung ketimbang martabat manusia. Penumpukan kekayaan terus bertambah seiring dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Implikasinya ialah bahwa Gereja Katolik menolak secara tegas segala bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Pembiaran kemiskinan ialah salah satu aspeknya. Isi dokumen sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Anggota Gereja Katolik, khususnya, serta rakyat Indonesia pada umumnya diajak untuk *aware* akan situasi sosial dan mengungkapkan kepeduliannya sesuai dengan profesi masing-masing.

The Boundlessness of Human Dignity and Economic Inequality: An Ethical Review Based on *Dignitas Infinita*

Keywords:

economic inequality, poverty, *Dignitas Infinita*, human dignity.

Abstract

Justice is inseparable from human dignity. When dignity is violated, a reaction naturally arises. The riots that broke out in several places in Indonesia at the end of August 2025 were a real example of this. The people's suffering stood in stark contrast to the lavish and ostentatious lifestyles of members of the House of Representatives; this is a truly heartbreaking reality. In the light of Dignitas Infinita, this is a clear violation of human dignity. It is a gift from God, freely given to all people without exception and inherent. Social status or wealth has nothing to do with it; nothing can take it away. Yet government policies that in fact deepen poverty stand as undeniable evidence of this distortion. The flexing phenomena of wealth by public officials reveals how money has come to be valued and praised more highly than human dignity itself. As wealth continues to accumulate in the hands of a few, unemployment and poverty persist at alarming levels. In response, the Catholic Church firmly rejects every form of offense against human dignity—including the tolerance of poverty itself. The message of Dignitas Infinita remains profoundly relevant to Indonesia's current reality. Members of the Catholic Church, and society at large, are called to be aware of these social injustices and to voice their concern through their respective callings and professions.

Pendahuluan

Pada akhir Agustus 2025, kerusuhan terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Hal ini dipicu oleh kesenjangan situasi ekonomi rakyat dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di satu sisi rakyat mengalami keadaan sulit dengan meningkatnya angka pengangguran, tiadanya jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor informal, serta meningkatnya biaya hidup dan harga bahan kebutuhan pokok. Di sisi lain, para anggota DPR menikmati hidup dalam kemewahan, adanya berbagai fasilitas, penambahan tunjangan, serta melakukan *flexing* akan harta yang dimiliki. Tindakan *joget* bersama sewaktu keputusan penambahan insentif disetujui kala itu menjadi pemicu kemarahan

rakyat. Realitas demikian menimbulkan keguncangan akan nilai kemanusiaan, khususnya martabat dari manusia itu sendiri. Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Aparat pemerintahan bertugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat demi kebaikan bersama (*bonum commune*). Terlebih, Indonesia menggunakan sistem demokrasi.¹

Gereja Katolik, lewat Ajaran Sosial Gereja, senantiasa menaruh perhatian pada hal kemanusiaan. Dokumen *Dignitas Infinita*, yang diterbitkan oleh Dikasteri Ajaran Iman atas permintaan mendiang Paus Fransiskus, merupakan pernyataan tegas serta sikap Gereja terhadap martabat manusia. Martabat itu diberikan oleh Tuhan, melekat pada setiap manusia, dan tidak terbatas. Judul dokumen mengungkapkannya secara eksplisit. Status sosial, jumlah harta yang dimiliki, jabatan, maupun keadaan fisik tidak memberikan pengaruh pada martabat manusia. Siapapun tidak memiliki hak untuk mencabut hal itu

Artikel ini hendak meninjau dan merefleksikan fenomena pelbagai kerusuhan menjelang September 2025 dalam terang *Dignitas Infinita*. Martabat manusia yang luhur dihadapkan pada situasi dan pengalaman riil akan ketidakadilan. Refleksi etis ini pertama-tama bertujuan untuk memberikan informasi akan realitas sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Sikap para pejabat negara disandingkan dengan keadaan rakyat jelata. Tidak hanya itu, hasil penelaahan juga berupaya menemukan arah kebijakan pastoral, khususnya bagi umat Katolik di Indonesia agar solidaritas, keadilan, dan penghargaan akan martabat manusia dijunjung tinggi. Namun, hal ini tidak tertutup bagi siapa saja yang berkehendak baik. Metode yang digunakan ialah studi pustaka. Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya menjadi refleksi belaka. Akan tetapi, dapat berbuah dalam tindakan nyata, khususnya pada penegakan penghargaan yang berkesinambungan akan martabat manusia.

Kajian Pustaka

Gereja, Martabat Manusia, dan Masalah Sosial

Gereja Katolik menaruh perhatian secara lebih khusus pada masalah sosial sejak 1908. Masalah ketidakadilan yang dialami buruh pabrik akibat revolusi industri menggerakkan Paus Leo XIII untuk menerbitkan *Rerum Novarum*. Di sini Gereja Katolik memasuki suatu permulaan baru dan perkembangan istimewa mengenai perhatian akan masalah-masalah sosial (Kompendum Ajaran Sosial Gereja Katolik art. 87). Ensiklik tersebut merupakan dokumen

¹ Anugrah Dwi, "Demokrasi: Pengertian, Sejarah, dan Contohnya," *UMSU Program Pascasarjana*, 12 September 2023, tersedia dari: <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>; diakses 17 Oktober 2025.

pertama yang membahas masalah kemasyarakatan. Fakta ini tidak berarti bahwa sebelumnya Gereja mengabaikan persoalan sosial. Perhatian tersebut berkesinambungan hingga saat ini. Pelayanan Gereja tidak terbatas di bidang peribadatan. Beberapa dokumen lainnya ialah *Quadragesimo Anno*, *Populorum Progressio*, *Laborem Exercens*, *Mater et Magistra*, *Centesimus Annus*. Martabat manusia menjadi tema dan selalu diperjuangkan. Contohnya, *Rerum Novarum* menyoroiti keadilan upah buruh dan hak-haknya.² Salah satu dokumen terbaru ialah *Dignitas Infinita*. Hal ini akan dijelaskan kemudian. Prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja ialah solidaritas, subsidaritas, serta kesejahteraan umum.³

Dalam Kitab Suci, martabat manusia senantiasa mendapatkan tempat yang mulia. Pada kisah penciptaan, manusia adalah ciptaan yang amat baik (Kej 1:31). Ciptaan lainnya hanya dikatakan baik. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus menunjukkan perhatian dan penghargaan tiada henti akan martabat manusia. Bahkan, Dia menghayatinya lintas suku dan pada orang-orang kecil. Mereka itu adalah yang disingkirkan oleh masyarakat, seperti pemungut cukai (Luk 19:1-10), orang kusta (misalnya Mrk 1:40-45), dan pelacur (Luk 8:2-3). Anak kecil dan perempuan (terlebih para janda) kurang diperhitungkan eksistensinya dalam struktur bangsa Yahudi. Akan tetapi, keberpihakan kepada mereka tidak pernah luput dari pelayanan Yesus. Dia sendiri menunjukkan keberpihakan kepada kaum kecil dan miskin (*preferential option for the poor*).

Di dalam perjalanan sejarah Gereja selanjutnya ada beberapa tarekat religius lahir karena keprihatinan terhadap orang miskin atau yang tersingkir. Contohnya, ialah Misionaris Cinta Kasih. Santa Teresia dari Kalkuta mendirikan tarekatnya untuk melayani yang paling miskin.⁴ Di sini dapat dilihat Gereja tidak pernah menutup mata akan keberadaan dan nasib mereka. Pada awal karya misi Katolik di Indonesia, hal ini juga selalu ditampakkan. Di sinilah dialog dan perkenalan itu terjadi.

Dignitas Infinita

Dokumen *Dignitas Infinita* diterbitkan oleh Dikasteri Ajaran Iman tanggal 8 April 2024 dalam rangka memperingati 75 (tujuh puluh lima) tahun Deklarasi

² Armada Riyanto, "Sekilas Tentang Dokumen-Dokumen Ajaran Sosial Gereja," *Iman Katolik: Media Informasi & Sarana Katekese*, tersedia dari: https://www.imankatolik.or.id/ajaran_sosial_gereja.html; diakses 17 Oktober 2025.

³ Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, "Kompandium Ajaran Sosial Gereja," tersedia dari: https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/kompandium_text_id.pdf; diakses 17 Oktober 2025.

⁴ Missionaries of Charity, "Our History," tersedia dari <https://missionariesofcharity.org/about-us/our-history/>; diakses 17 Oktober 2025.

Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus 19 (sembilan belas) tahun wafatnya Paus Santo Yohanes Paulus II.⁵ Paus Fransiskus memberikan persetujuan akan penerbitannya. Pada dirinya, *Dignitas Infinita* adalah pernyataan tentang martabat manusia. Deklarasi ini merupakan penegasan akan sikap Gereja bahwa martabat manusia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dokumen lainnya yang amat berhubungan ialah *Gaudium et Spes*, *Fratelli Tutti*, dan *Laudato Si'*.

Dignitas Infinita terdiri atas 4 (empat) bagian besar. Berikut ini akan dijelaskan setiap bagiannya. Deklarasi dimulai dengan kesadaran martabat manusia yang tidak terbatas (DI 1). Setiap orang tanpa kecuali memilikinya secara inheren, melampaui segala keadaan dan status.⁶ Manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, serta ditebus oleh Yesus Kristus. Prinsip tersebut menjadi acuan bagi Gereja untuk membela martabat manusia. Tiadanya penghargaan akan kebebasan, hak untuk menganut agama, hak milik pribadi, integritas fisik dan mental serta hak hidup layak merupakan pelanggaran atas martabat manusia. Oleh karena itu, perjuangan untuk membelanya, secara khusus pada kaum kecil dan tertindas senantiasa menjadi misi Gereja. Beberapa paus pendahulu, seperti Paus Santo Paulus VI dan Paus Santo Yohanes Paulus II memberikan penegasan.

Bagian pertama membahas pertumbuhan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Secara biblis dinyatakan secara eksplisit bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej 1:26-27). Artinya, tiap orang memiliki nilai sakral yang melampaui jenis kelamin, seksual, sosial, politik, budaya, dan agama (DI 11). Sepanjang sejarah keselamatan, hak kaum miskin selalu dihargai dan diperjuangkan, misalnya pada Kel 3:7, Ul 24:17, dan Yes 10:1-2. Perilaku demikian juga tampak dalam pelayanan Yesus di dunia. Martabat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan keadaan apapun. Karakter tidak-dapat-dicabut ini memungkinkan untuk senantiasa berbicara mengenai hak asasi manusia serta pembelaannya (DI 14). Perspektif ini selaras dengan Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Bagian kedua menyatakan Gereja yang selaluewartakan martabat yang sama untuk setiap manusia. Kondisi dan kualitas hidup tidak memengaruhi tinggi rendahnya martabat seseorang. Manusia adalah *imago Dei* sejak

⁵ Dikasteri untuk Ajaran Iman, *Dignitas Infinita* (8 April 2024), art. 63 (terj. Th. Eddy Susanto SCJ, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2024).

⁶ Pada DI artikel 7 dipaparkan secara singkat tentang 4 (empat) macam martabat manusia, yaitu martabat ontologis, moral, sosial, dan eksistensial. Yang menjadi pokok seruan dan refleksi *Dignitas Infinita* ialah martabat ontologis. Martabat ini ada karena manusia ada, dikehendaki, diciptakan, dan dicintai Allah. Jenis ini tidak akan pernah bisa hilang, dihapus, dan selalu berlaku melampaui situasi apapun yang dialami seseorang.

diciptakan. Gambar ini tak pernah akan terhapuskan. Lebih lanjut, martabat manusia diangkat oleh Kristus ketika berinkarnasi (DI 19). Setiap orang dipanggil kepada kepenuhan martabat dengan meneladani Kristus agar dapat menampakkan kemuliaan Bapa. Mereka diarahkan menuju kebaikan sejati sebagai tanggapan atas kasih Allah (DI 22). Tindakan dosa merupakan percideraan atas hakikat manusia sendiri (*contra naturam*).

Bagian ketiga menguraikan martabat sebagai dasar hak dan kewajiban manusia. Martabat memberikan bantuan untuk menyelesaikan cara pandang yang salah akan kebebasan (bdk. DI 26). Seseorang dikatakan bebas bukan dengan tiadanya acuan di luar diri dan norma-norma obyektif. Jika demikian yang terjadi, penghargaan akan martabat orang lain dan pertumbuhan sikap peduli akan menjadi amat sulit. Padahal, manusia pada dirinya ialah makhluk relasional. Keberadaan orang lain adalah suatu keniscayaan. Kebebasan sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan Allah (DI 30). Pemaknaan dan penghayatannya secara keliru akan membuat manusia semakin tidak bermartabat.

Bagian terakhir membahas beberapa macam pelanggaran martabat manusia, baik dari bidang ekonomi, bioetika, maupun siber. Semua orang diajak untuk menyadari tanggung jawab dan berkomitmen akan hal tersebut (DI 33). Jenis pelanggaran yang menjadi sorotan ialah drama kemiskinan, perang, penderitaan para migran, perdagangan manusia, pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan, aborsi, ibu pengganti (surogat), eutanasia dan bunuh diri dengan bantuan, marginalisasi penyandang disabilitas, teori gender, perubahan jenis kelamin, dan kekerasan digital. Perihal drama kemiskinan disebut pertama sebagai suatu negasi atas martabat manusia (DI 36). Salah satu penyebab kemiskinan ekstrem ialah distribusi kekayaan yang tidak merata. Artinya, harta menumpuk di segelintir orang. Di satu pihak kekayaan mengalami peningkatan luar biasa, tetapi diiringi semakin tingginya kesenjangan serta bentuk kemiskinan baru. Artikel 37 mengungkapkan salah satu contohnya, yaitu obesesi memangkas biaya kerja. Bila dilakukan dengan tidak mengindahkan faktor etis, akan meningkatkan angka pengangguran. Dengan sendirinya, kemiskinan semakin meluas. Pelanggaran-pelanggaran lain memiliki dampaknya masing-masing. Perang, misalnya, merupakan kekalahan kemanusiaan (DI 38). Hal ini tidak hanya mencakup kontak senjata atau teroris, tetapi juga penindasan karena agama atau suku.

Setelah keempat hal diuraikan, dokumen *Dignitas Infinita* ditutup dengan ajakan kuat untuk menghormati martabat manusia apapun keadaannya (DI 64). Komitmen sungguh dituntut. Tanggung jawab ini mengikat baik warga negara maupun pemerintah. Kondisi agar setiap pribadi terjamin dapat berkembang

secara utuh juga menjadi tugas negara. Penghargaan akan martabat manusia sangat fundamental bagi kehidupan bersama masyarakat sipil. Pelanggaran sudah amat banyak terjadi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu studi pustaka. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Dignitas Infinita* disandingkan dengan kerusuhan di Indonesia akhir Agustus 2025. Dalam dokumen tersebut terdapat pelbagai prinsip akan martabat manusia. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat merefleksikan secara etis-teologis fenomena tersebut lalu menggugah pembaca agar ikut membela martabat manusia.

Hasil dan Pembahasan

Setelah uraian singkat akan *Dignitas Infinita*, bagian keempat akan merefleksikan secara etis atas kerusakan yang terjadi di akhir Agustus 2025 silam. Sebelumnya, akan dipaparkan sedikit fenomena tersebut.

Fenomen Kerusuhan Akhir Agustus 2025

Pada 15 Agustus 2025, pemerintah bersama aparatnya mengikuti Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Salah satu perihalnya ialah penambahan tunjangan perumahan. Mereka yang berdomisili di luar Jakarta difasilitasi untuk kepemilikan tempat tinggal. Setelah keputusan disetujui, para peserta sidang, yang adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) *berjoget* bersama. Hal ini memicu kemarahan masyarakat luas.⁷ Tindakan mereka dianggap melukai hati rakyat karena tidak menunjukkan simpati. Rakyat jelata sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan sulitnya lapangan kerja, kurangnya jaminan sosial, dan melambungnya harga kebutuhan pokok. Mereka yang bekerja di sektor informal mendapat gaji tanpa layanan jaminan seperti fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Di tengah situasi sulit, *attitude* para wakil rakyat menunjukkan suasana gembira dan pesta pora. Rakyat berada dalam ketidakpastian, tetapi para wakil mendapatkan insentif tambahan.

Penyebab kedua ialah perkataan beberapa pejabat. Salah satu menyatakan persetujuan akan penambahan tunjangan agar bias mendapat domisili di dekat kantor.⁸ Perkataan tersebut semakin membuat rakyat naik darah. Perkataan

⁷ Lih. Tim Detik Kalimantan, "Joget hingga Tunjangan, Ini Sederet 'Aksi' Anggota DPR yang Tuai Kritikan," *Detik Kalimantan*, 25 Agustus 2025, tersedia dari: <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8077301/joget-hingga-tunjangan-ini-sederet-aksi-anggota-dpr-yang-tuai-kritikan>; diakses 20 Oktober 2025.

⁸ Pejabat tersebut mengatakan jarak cukup jauh dari kediamannya menuju gedung MPR-DPR. Ia merasa lelah. Adanya tunjangan rumah akan memangkas waktu perjalanan dan menghemat tenaga.

dua peserta sidang lain juga menimbulkan kecaman dari pelbagai pihak. Di sisi lain, banyak rakyat yang bekerja Jakarta, tetapi tinggal di luar Jakarta. Mereka harus berjuang keras, bangun amat pagi, mengalami kemacetan, dan/atau berdesak-desakan saat hendak menikmati layanan transportasi publik. Padatnya halte bus Transjakarta, stasiun *Mass Rapid Transit* (MRT), *Commuter Line*, atau *Light Rail Transit* (LRT) saat *peak time* adalah pemandangan normal. Penyebab kedua ialah ketidakpuasan rakyat atas kinerja pemerintahan.⁹

Semua realitas yang telah disebutkan sebelumnya meledakkan amarah rakyat dan menimbulkan demonstrasi. *Attitude* para wakil rakyat dikritik dan pelbagai tuntutan disampaikan.¹⁰ Mayoritas merasakan pengabaian pejabat atas kebutuhan rakyat. Demonstrasi tidak hanya terjadi di Jakarta. Hal serupa juga terjadi di Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makassar, dan beberapa tempat lain. Durasi tidak hanya satu hari, tetapi dari 25 Agustus hingga awal September. Demonstrasi kali ini juga berujung kerusuhan. Beberapa fasilitas umum mengalami pengrusakan, seperti pos keamanan dan kios Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kemarahan diperparah dengan tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek dalam jaringan (daring). Kejadian lainnya ialah orang hilang, yaitu Muhammad Farhan Hamid (Farhan) dan Reno Syahputra Dewo (Reno) pasca demo.¹¹

Kerusuhan Akhir Agustus 2025 dalam Kacamata Dignitas Infinita

Setelah uraian singkat atas kerusuhan yang terjadi, pada bagian ini akan dipaparkan refleksi etis dan teologis atas peristiwa tersebut. Kerusuhan terjadi karena ada penyebabnya. Secara umum, pelanggaran martabat manusia (*human dignity*) terjadi sebelum, selama, dan setelah kerusuhan.¹² Refleksi dilakukan tidak sebatas fenomena kerusuhan saja, tetapi juga mencakup faktor penyebab dan kejadian lain yang menyertainya.

⁹ Hal ini diperkuat dengan sebuah jajak pendapat. Lih. Yohanes Mega Hendarto, "Polarisasi Pascademo Berujung Rusuh," *Kompas*, 15 September 2025, 3. Pada artikel tersebut ditampilkan hampir 50% menyatakan bahwa tindakan pemerintah belum tepat terkait rangkaian aksi demonstrasi. Namun, ketidakpuasan tidak hanya karena hal tersebut. Banyak hal lain telah membuat rakyat merasa tidak puas atas kinerja pemerintah.

¹⁰ Tuntutan yang disampaikan itu terkenal dengan sebutan "17+8". Hal ini dekat dengan peringatan ke-80 tahun Indonesia merdeka.

¹¹ Faisal Irfani, "Teka-teki Orang Hilang dalam Demo Agustus dan Dugaan Teror Aparat – 'Tolong Bantu Temukan Anak Saya,'" *BBC News Indonesia*, 18 September 2025, tersedia dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj07my805lno>; diakses 18 Oktober 2025.

¹² Keprihatinan ini sampai menarik perhatian PBB. Lih. Firyalfatini, "PBB Desak Pemerintah Indonesia Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM dalam Aksi Demonstrasi," *Hukum Online*, 2 September 2025, tersedia dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pbb-desak-pemerintah-indonesia-selidiki-dugaan-pelanggaran-ham-dalam-aksi-demonstrasi-lt68b6853f2433f/>; diakses 20 Oktober 2025.

Keputusan yang Mencederakan

Para anggota DPR mengungkapkan kegembiraan lewat *joget*. Hal ini disebabkan disetujuinya penambahan insentif perumahan. Keputusan yang diambil saat itu jelas menampakkan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat (meski kemudian dibatalkan). Jika kondisi riil sungguh-sungguh diketahui pemerintah, penentuan kebijakan akan lebih bijaksana. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR memang membutuhkan sarama agar dapat menunaikan tugas pelayanannya. Akan tetapi, momen pengambilan tidak tepat. Banyak rakyat kecil membanting tulang dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok.¹³ Kesulitan lapangan pekerjaan dan harga barang kebutuhan yang melambung menjadi tantangan utama. Kenaikan insentif mengindikasikan pemerintah harus memiliki jumlah uang yang lebih besar. Konsekuensinya, biaya pelayanan akan menjadi lebih besar.¹⁴ Kebijakan pemerintah mendukung distribusi kekayaan yang tidak merata (DI 36). Aspek ketidakadilan sangat jelas terlihat.¹⁵ Dengan demikian, keputusan merupakan percideraan sekaligus pengingkaran martabat manusia. *Dignitas Infinita* amat menentang keras tindakan demikian. Tanpa tambahan insentif, para anggota DPR telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Bahkan, mereka tidak jarang memamerkan (*flexing*) harta benda dan pengalaman berlibur.¹⁶ Jika kerusakan tidak terjadi, pemerintah mungkin akan tetap memberikan tambahan insentif. Kesenjangan sudah lama terjadi. Bila keputusan tetap dijalankan, hal itu akan semakin memperparah keadaan. Artikel 36 menyebutnya sebagai suatu skandal.¹⁷

Di dalam sejarah dunia, Revolusi Perancis dapat menjadi suatu cerminan. Dalam arti tertentu, revolusi terjadi karena penderitaan rakyat akibat pajak yang tinggi. Orang-orang dengan kelas sosial tinggi menikmati hidup di dalam

¹³ Nikson Sinaga, "Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi," *Kompas*, 20 September 2025, tersedia dari <https://www.kompas.id/artikel/harga-bahan-pokok-melambung-tinggi-dirut-bulog-turun-ke-pasar-pasar-di-sumut>; diakses 19 Oktober 2025.

¹⁴ Contohnya, kasus pajak di Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon mencanangkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1000% karena pemangkasan anggaran dari pusat. Di sini tampak jelas rakyat menjadi korban. Lih. Fabio Maria Lopes Costa, "PBB Kota Cirebon Naik hingga 1000 persen, Warga Berikan Batas Waktu Revisi," *Kompas*, 25 Agustus 2025, tersedia dari: <https://www.kompas.id/artikel/pbb-kota-cirebon-hingga-1000-persen-warga-berikan-batas-waktu-revisi>; diakses 20 Oktober 2025.

¹⁵ Bdk. Fransiskus, *Fratelli Tutti* (10 Maret 2020), art. 22 (terj. T. Krispurwana Cahyadi SJ), tersedia dari <https://keuskupanbandung.org/wp-content/uploads/2024/11/Fratelli-Tutti-1.pdf>; diakses 21 Oktober 2025.

¹⁶ Retno Wulandari Adi, "Dampak *Flexing* Anggota DPR Meningkatkan Kecemburuan Sosial, Tetap Bijak Menahan Diri Saat Keberhasilan Menghampiri," *Melintas*, 2 September 2025, tersedia dari <https://www.melintas.id/ragam/346516106/dampak-flexing-anggota-dpr-meningkatkan-kecemburuan-sosial-tetap-bijak-menahan-diri-saat-keberhasilan-menghampiri>; diakses 18 Oktober 2025.

¹⁷ Skandal berarti perbuatan yang memalukan dan menurunkan martabat seseorang. Lih. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," tersedia dari <https://kbbi.web.id/skandal>; diakses 20 Oktober 2025.

kenyamanan. Di Indonesia sendiri demonstrasi serta kerusuhan masif pernah terjadi tahun 1998. Gerakan masal timbul karena pengalaman tertindas, terluka, dan situasi yang tidak kondusif. Kerusuhan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Perancis, Nepal, Maroko, dan Filipina. Semuanya memiliki latar belakang yang serupa.

Penyuburan Kemiskinan (Kemiskinan Struktural)

Setiap pemerintahan di suatu negara memiliki cita-cita untuk memberantas kemiskinan. Pelbagai upaya dilakukan untuk hal ini. Penambahan tunjangan bagi anggota DPR juga merupakan suatu penyuburan kemiskinan (bdk. DI 37). Rakyat, yang sangat membutuhkan bantuan dalam hal finansial, justru malahan dipersulit. Jika keputusan tersebut tidak dibatalkan, orang miskin akan semakin tidak mengalami peningkatan taraf hidup. Dengan demikian, kemiskinan malahan semakin disuburkan. Dana tidak dialirkan kepada pihak yang sungguh-sungguh membutuhkan. Bila kemiskinan dibiarkan terus bertumbuh subur, pemerintah melawan hakikatnya sendiri. Meskipun angka kemiskinan secara *de jure* turun, secara *de facto* tidaklah demikian. Banyak orang masih belum sejahtera dan tiadanya jaminan sosial. Jika rakyat sudah berada dalam kemakmuran, kerusuhan Agustus 2025 tidak akan terjadi.

Dalam sejarah keselamatan, tindakan pemerintah kerap kali mendapat kritikan sejak zaman nabi-nabi hingga periode Yesus sendiri. Misalnya, Amos mengkritik praktik kepemimpinan yang tidak adil (Am 5:7-13).¹⁸ Ketika memulai misi-Nya, Ia mengatakan untuk membawa kabar gembira, kelepasan, dan pengharapan bagi orang miskin (Luk 4:18-19). Berdasarkan perkataan tersebut, ada indikasi bahwa orang miskin berada dalam situasi terbelenggu dan tidak berdaya. Pada era Yesus, rakyat diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Para pemungut cukai diberi wewenang untuk menaikkan nilainya untuk kepentingan sendiri.¹⁹ Orang miskin tetap miskin dan tertindas. Di sisi lain, sebagian orang hidup dalam kenyamanan. Keadaan demikian menyuburkan kemiskinan.

Pengingkaran martabat lewat kekerasan

Ketika demonstrasi dan kerusuhan terjadi, ada indikasi tindak kekerasan dan represif oleh aparat keamanan. Contohnya, kekerasan yang dialami

¹⁸ Lih. Yohanes Krismantyo Susanta, "Dosa Pemimpin Israel dan Eksesnya bagi Kehidupan Umat Menurut Amos 5," *Track: Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi, dan Entrepreneurship* 2, no. 01 (2023) [jurnal online]; tersedia dari <https://ejurnal.stepsmg.ac.id/home/article/download/34/61/298>; diakses 21 Oktober 2025.

¹⁹ James Rochford, "Tax Collectors in Jesus' Day," *Evidence Unseen*, tersedia dari <https://evidenceunseen.com/theology/historical-theology/tax-collectors-in-jesus-day>; diakses 21 Oktober 2025.

seorang pria berusia 29 tahun.²⁰ Setelah merekam demonstrasi, ia ditegor dengan kasar, dikeroyok, dirampas ponsel dan dompetnya, lalu ditahan menjalani pemeriksaan selama 15 (lima belas) jam dalam keadaan luka parah keesokan harinya. Barang yang dirampas tidak dikembalikan. Perkataan jujur membuahkan pukulan.

Fenomen kekerasan lain ialah tewasnya Affan Kurniawan. Ia bekerja sebagai seorang pengemudi ojek daring. Affan menjadi korban karena dilindas mobil lapis baja Brigade Mobil (Brimob).²¹ Korban diperlakukan seperti benda yang dapat dilindas begitu saja. Selain Affan, ada korban lain di lokasi berbeda, misalnya Rheza Sendy Pratama di Yogyakarta dan Sumari di Solo. Tindakan dengan maksud pengamanan berubah menjadi kebrutalan. Realitas ini menimbulkan kecaman dari banyak pihak serta berbagai kalangan.²²

Perlakuan represif dan brutal aparat keamanan dapat dikategorikan sebagai suatu persekusi. Dalam kacamata *Dignitas Infinita*, tindakan mereka merupakan percideraan martabat manusia (DI 38). Korban mengalami kekerasan. Lembaga keamanan nasional pada dirinya bertugas untuk melayani masyarakat dengan menjamin keamanan. Aparat keamanan melawan kodratnya sendiri karena mengambil rasa aman. Lebih lanjut lagi, ponsel, dompet, serta identitas dirampas. Rekaman data digital dihapus. Karena tidak hanya terjadi pada satu orang, perilaku demikian merupakan penyembunyian informasi dan juga menciderai kebebasan PERS. Selain bertentangan dengan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 39/1999²³, apa yang dialami korban merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Apatisme

Apatisme tidak langsung mengacu pada kejadian demonstrasi yang berujung kerusakan, tetapi pada penyebabnya. Dua hal dapat diidentifikasi. Secara tidak langsung merupakan percideraan terhadap martabat manusia. Usulan untuk menaikkan tunjangan diberikan saat kondisi rakyat kesulitan

²⁰ Prayogi Dwi Sulisty, Stefanus Ato, et al. "Pengeroyokan di Awal Malam yang Berujung Penahanan 15 Jam," *Kompas*, 30 September 2025, tersedia dari <https://www.kompas.id/artikel/pengeroyokan-di-awal-malam-yang-berujung-penahanan-15-jam>; diakses 21 Oktober 2025. Sang korban mengalami kepala benjol, mata memar, dan gigi patah.

²¹ Pribadi Wicaksono dan Intan Setiawanti, "Tujuh Orang Tewas dalam Demonstrasi Agustus 2025, Siapa Saja Mereka?" *Tempo*, 1 September 2025, tersedia dari <https://www.tempo.co/politik/tujuh-orang-tewas-dalam-demonstrasi-agustus-2025-siapa-saja-mereka-2065432>; diakses 20 Oktober 2025.

²² Hanifah Dwi Jayanti, "Ramai-ramai Kecam Aksi Brutal Aparat Saat Unjuk Rasa," *Hukum Online*, 29 Agustus 2025, tersedia dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-hingga-organisasi-kampus-ramai-ramai-kecam-aksi-brutal-aparat-saat-unjuk-rasa-lt68b1d333a496a/>; diakses 20 Oktober 2025.

²³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," tersedia dari <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>; diakses 21 Oktober 2025.

keuangan. Poin pertama jelas menunjukkan apatisme para anggota DPR. Mereka hanyut dalam kenyamanan dan tidak memperhatikan keadaan sekitar. Kedua, usulan disetujui dan dirayakan dengan berjoget bersama. Tindakan ini sangat tidak etis karena menyetujui pembiaran kemiskinan (bdk. DI 36). Kegembiraan dirayakan di atas penderitaan rakyat. Sebagian besar rakyat sudah memiliki rasa tidak puas akan kinerja pemerintahan. Fenomen *joget* menjadi semacam *pentrigger* detonator bom kemarahan rakyat. Sebagai tambahan, rasa tidak suka juga muncul karena fenomena *flexing*, misalnya oleh Sri Mulyati (Bebizie).²⁴ Di sisi lain dapat direfleksikan pula bahwa para anggota DPR lebih mengagungkan uang daripada manusia. Hal ini pun dikecam oleh *Dignitas Infinita* (bdk DI 41).

Dalam Perjanjian Baru, kerusakan akhir Agustus 2025 memiliki keserupaan dengan kisah antara orang kaya dan Lazarus yang miskin (Luk 16:19-25). Si kaya setiap hari berpesta dan berpakaian mewah. Warna ungu melambangkan status sosialnya. Di sisi lain, Lazarus hanya meminta remah-remah yang jatuh dari meja. Klausa “anjing menjilati boroknya” mengindikasikan keberadaan Lazarus tidak diperhitungkan oleh si kaya. Anjing, dalam konteks perikop ini, melambangkan kenajisan. Si kaya bergembira di atas penderitaan orang lain. Orang kaya tersebut bersikap apatis terhadap Lazarus.

Relevansi

Setelah merefleksikan secara etis-teologis fenomena kerusakan Agustus, akan dilihat bagaimana relevansinya dengan keadaan saat ini. Martabat manusia ialah nilai universal; agama, suku, dan ras tidak membatasinya. Tidak satupun seorang yang berhati nurani baik akan menyetujui ketidakadilan. Adil, damai, dan sejahtera kerap disebut bersama sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Semua negara dengan sistem pemerintahan unik dan latar belakang berbeda berjuang demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perjuangan dan pembelaan mengatasi suku dan agama. Akan tetapi, sebagai dokumen Gereja, relevansi ditujukan untuk umat Katolik.

Pertama, dokumen *Dignitas Infinita* menjadi pengingat akan tanggung jawab sosial. Seseorang hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri. Perhatian kepada sesama, khususnya kaum lemah, bersifat kontinu. Sangat beragam pelanggaran terhadap martabat manusia. Sikap *awareness* menjadi penting di era digital. Manusia *in se* adalah makhluk sosial. Sikap cuek, sibuk dengan diri

²⁴ Sumarni, “Anggota DPRD Bebizie *Flexing* Liburan Mewah di Eropa, Isu Jadi Ani-Ani Pejabat Diungkit,” *Suara.com*, 26 Agustus 2025, tersedia dari <https://www.suara.com/entertainment/2025/08/26/152002/anggota-dprd-bebizie-flexing-liburan-mewah-di-eropa-isu-jadi-ani-ani-pejabat-diungkit>; diakses 21 Oktober 2025.

sendiri, dan acuh tak acuh merupakan tantangan bersama.²⁵ Semua orang adalah saudara.

Kedua, refleksi etis-teologis atas fenomena kerusuhan Agustus 2025 dapat menjadi momen pertobatan sosial (bdk. Rm 13:11). Secara khusus momen ini diperuntukkan bagi para pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah, petugas keamanan dalam segala bentuknya, serta semua saja yang berwenang. Ketika manusia begitu tidak dihargai, reaksi besar akan timbul. Sebagai *public figure*, segala sikap dan tindakan akan menjadi sorotan. Mereka perlu lebih bijaksana dan sadar. Penyampaian ide, usul, dan saran seyogyanya memerhatikan situasi sekitar yang lebih luas. Sikap altruis memang tidaklah terhindarkan. Pelayan publik pertama-tama tidak tertuju kepada diri sendiri dan memenuhi kebutuhan pribadi. Kebijakan akan membawa pada *bonum commune*. Selain itu, mawas diri juga merupakan suatu keniscayaan. Keutamaan ini berlawanan dengan keserakahan. Kelompok kecil, lemah, dan tertindas menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penentuan kebijakan (bdk. FT 106-107). Pejabat publik dipilih secara langsung lewat pemilihan umum. Mereka mengemban tugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat sehingga disebut wakil rakyat.

Ketiga, *Dignitas Infinita* dikeluarkan oleh Dikasteri Ajaran Iman. Deklarasi ini menegaskan disposisi Gereja untuk selalu membela martabat manusia. Oleh karena itu, sangat relevan bagi pertobatan umat Katolik. Sikap acuh tak acuh dapat menyerang siapa saja tanpa memandang bulu. Bahaya hanyut dan tenggelam dalam kenyamanan pun serupa. Kerusuhan yang terjadi dapat dijadikan momen pertobatan secara lebih. Yesus memberikan teladan dengan mengosongkan diri-Nya (Flp 2:6-11), berkorban, dan membiarkan kehendak Bapa yang terjadi (Yoh 4:34). Refleksi etis dapat pula menjadi momen untuk menumbuhkan kasih. Keutamaan kardinal tersebut bisa menjadi fundamen serta motor dalam pembelaan martabat manusia. Semua orang yang telah dibaptis dipanggil untuk menjadi terang, garam, dan saksi bagi kehidupan bersama. Selain Yesus, tidak sedikit tokoh dalam Gereja yang sudah menjadi pejuang akan martabat manusia. Sikap *tenang-tenang* saja saat mengetahui adanya pelanggaran martabat manusia sangat tidak sesuai dengan semangat deklarasi ini.²⁶ Kepedulian dibutuhkan dan perlu terus disuburkan. Perjuangan dan pembelaan terhadap martabat manusia adalah perjuangan

²⁵ Fransiskus, *Evangelii Gaudium* (24 November 2013), art. 54 dan 208 (terj. Martin Harun OFM dan T. Krispurwana Cahyadi SJ), Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2014).

²⁶ Bernard V. Brady, "Dignitas Infinita: A Syllabus of Errors for the 21st Century?" *Journal of Moral Theology* 13, no. 2 (2025) [jurnal online]; tersedia dari <https://jmt.scholasticahq.com/article/121936-dignitas-infinita-a-syllabus-of-errors-for-the-21st-century>; diakses 18 Oktober 2025.

seorang Kristiani seumur hidupnya (bdk. FT 111). Secara khusus, *spirit* dari pernyataan tegas *Dignitas Infinita* juga amat relevan dengan umat Katolik yang terlibat aktif dalam pemerintahan. Mereka merupakan penyambung lidah kepada pemerintah dan ujung tombak Gereja. Bila mereka memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan, nilai-nilai *Dignitas Infinita* dapat menjadi acuan dan disposisi batin. Kesadaran baru dapat ditumbuhkan lewat deklarasi dan refleksi etis ini. Kardinal Suharyo konferensi Paska 2025 pernah menyoroti mengenai kesenjangan sosial.²⁷ Konsekuensinya, umat Katolik seyogyanya memiliki perhatian khusus akan masalah tersebut. Penerbitan *Dignitas Infinita* menjadi momen penegas agar semua anggota Gereja Katolik berjuang memberantas kesenjangan. Secara praktis, hal ini dapat dimulai dari sendiri dan lingkup kecil. Pembiasaan untuk bertindak adil, peduli pada sesama, khususnya yang kecil dan tersingkir, serta berbelarasa dapat membentuk habitus yang baik.

Keempat, penumbuhan rasa solidaritas. Terkait dengan poin pertama, keutamaan ini menjadi amat penting. Ketika rangkaian demonstrasi terjadi, dua hal layak mendapat perhatian. Pertama, solidaritas antar pengemudi ojek daring. Pemakaman Affan Kurniawan diikuti oleh banyak sekali pengemudi ojek daring.²⁸ Pengalaman negatif dan rasa senasib dapat menjadi titik awal tumbuhnya solidaritas. Hal serupa dapat dilihat saat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menjelang detik-detik proklamasi, pelbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda, berkonsolidasi dan berjuang bersama demi tujuan yang sama. Kedua, solidaritas dari negara tetangga.²⁹ Aksi bertema kemanusiaan menggerakkan lintas negara dan agama. Poin keempat ini juga ditegaskan dalam *Fratelli Tutti* (FT 114-115). Rasa solidaritas sangat bertentangan dengan *flexing*. Terbitnya dokumen *Dignitas Infinita* dapat menjadi pengingat untuk menjaga diri agar tidak terjermum dalam arus *flexing*.

²⁷ Tim Detikcom, "Saat Kardinal Suharyo Kutip Paus hingga Nasaruddin di Momen Paskah," *Detiknews*, 20 April 2025, tersedia dari <https://news.detik.com/berita/d-7877533/saat-kardinal-suharyo-kutip-paus-hingga-nasaruddin-di-momen-paskah>; diakses 28 Oktober 2025.

²⁸ Agus Susanto, "Pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak," *Kompas*, 29 Agustus 2025, tersedia dari <https://www.kompas.id/artikel/pemakaman-affan-kurniawan-di-tpu-karet-bivak>; diakses 21 Oktober 2025. Pada foto yang ditampilkan, tampak begitu banyak pengemudi ojek daring mengikuti upacara pemakaman.

²⁹ Vina Murni Ambarwati, "Aksi Warganet Malaysia-Thailand Pesankan Makanan via Online untuk Warga Indonesia yang Demo," *Kompas*, 1 September 2025, tersedia dari <https://video.kompas.com/watch/1873173/aksi-warganet-malaysia-thailand-pesankan-makanan-via-online-untuk-warga-indonesia-yang-demo>; diakses 21 Oktober 2025.

Fenomen tersebut juga telah disoroti sebagai hal yang merusak jati diri bangsa Indonesia.³⁰

Kesimpulan

Fenomen kerusakan akhir Agustus 2025 disebabkan perilaku para pejabat negara. Mereka bergembira atas penambahan tunjangan perumahan, sementara rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Kemarahan rakyat dimanifestasikan dalam demonstrasi yang berujung pada kerusakan. Dalam kacamata *Dignitas Infinita*, ada empat hal dapat direfleksikan: keputusan yang mencederakan, penyuburan kemiskinan, tindakan kekerasan, dan apatisme. Refleksi etis-teologis masih amat relevan hingga saat ini bagi semua orang yang berkehendak baik; secara khusus, bagi umat Katolik. Ada empat poin relevansi: pengingat akan tanggung jawab sosial, momen pertobatan sosial, serta penumbuhan rasa solidaritas.

Daftar Pustaka

- Adi, Retno. "Dampak *Flexing* Anggota DPR Meningkatkan Kecemburuan Sosial, Tetap Bijak Menahan Diri Saat Keberhasilan Menghampiri," *Melintas* (2 September 2025). <https://www.melintas.id/ragam/346516106/dampak-flexing-anggota-dpr-meningkatkan-kecemburuan-sosial-tetap-bijak-menahan-diri-saat-keberhasilan-menghampiri> (access 18.10.2025).
- Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia-Lembaga Biblika Indonesia, 2010.
- Ambarwati, Vina M. "Aksi Warganet Malaysia-Thailand Pesankan Makanan via Online untuk Warga Indonesia yang Demo," *Kompas* (1 September 2025). <https://video.kompas.com/watch/1873173/aksi-warganet-malaysia-thailand-pesankan-makanan-via-online-untuk-warga-indonesia-yang-demo> (access 21.10.2025).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," tersedia dari <https://kbbi.web.id/skandal> (access 20.10.2025).
- Brady, Bernard V. "Dignitas Infinita: A Syllabus of Errors for the 21st Century?" *Journal of Moral Theology* 13, no. 2 (2025). <https://jmt.scholasticahq.com/article/121936-dignitas-infinita-a-syllabus-of-errors-for-the-21st-century> (access 18.10.2025).
- Costa, Fabio M. L. "PBB Kota Cirebon Naik hingga 1000 persen, Warga Berikan Batas Waktu Revisi," *Kompas* (25 Agustus 2025). <https://www.kompas.id/artikel/pbb-kota-cirebon-hingga-1000-persen-warga-berikan-batas-waktu-revisi> (access 20.10.2025).
- Dikasteri untuk Ajaran Iman. *Dignitas Infinita* (8 April 2024). Diterjemahkan oleh Th. Eddy Susanto SCJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2024.
- Dwi, Anugrah. "Demokrasi: Pengertian, Sejarah, dan Contohnya." *UMSU Program Pascasarjana* (12 September 2023). <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/> (access 17.10.2025).

³⁰ Nuri Yatul Hikmah, "VIDEO Paskah 2023 di Katedral, Ignatius Suharyo Singgung Soal Mafia dan Flexing Pejabat," *Wartakotalive*, 9 April 2023, tersedia dari <https://wartakota.tribunnews.com/2023/04/09/video-paskah-2023-di-katedral-ignatius-suharyo-singgung-soal-mafia-dan-flexing-pejabat>; diakses 28 Oktober 2025.

- Firyalfatin. "PBB Desak Pemerintah Indonesia Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM dalam Aksi Demonstrasi," *Hukum Online* (2 September 2025).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pbb-desak-pemerintah-indonesia-selidiki-dugaan-pelanggaran-ham-dalam-aksi-demonstrasi-lt68b6853f2433f/> (access 20.10.2025).
- Fransiskus, *Fratelli Tutti*. Diterjemahkan oleh T. Krispurwana Cahyadi SJ, tersedia dari
<https://keuskupanbandung.org/wp-content/uploads/2024/11/Fratelli-Tutti-1.pdf>
 (access 21.10.2025).
- Fransiskus. *Evangelii Gaudium*. Diterjemahkan oleh Martin Harun OFM dan T. Krispurwana Cahyadi SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2014.
- Hendarto, Yohanes M. "Polarisasi Pascademo Berujung Rusuh," *Kompas*, 15 September 2025.
- Hikmah, Nuri Y. "VIDEO Paskah 2023 di Katedral, Ignatius Suharyo Singgung Soal Mafia dan Flexing Pejabat," *Wartakotalive* (9 April 2023). tersedia dari
<https://wartakota.tribunnews.com/2023/04/09/video-paskah-2023-di-katedral-ignatius-suharyo-singgung-soal-mafia-dan-flexing-pejabat> (access 28.10.2025).
- Irfani, Faisal. "Teka-teki Orang Hilang dalam Demo Agustus dan Dugaan Teror Aparat – 'Tolong Bantu Temukan Anak Saya,'" *BBC News Indonesia* (18 September 2025).
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj07my805lno> (access 18.10.2025).
- Jayanti, Hanifah D. "Ramai-ramai Kecam Aksi Brutal Aparat Saat Unjuk Rasa," *Hukum Online* (29 Agustus 2025). <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-hingga-organisasi-kampus-ramai-ramai-kecam-aksi-brutal-aparat-saat-unjuk-rasa-lt68b1d333a496a/> (access 20.10.2025).
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. "Kompodium Ajaran Sosial Gereja."
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/kompodium_text_id.pdf (access 17.10.2025).
- Missionaries of Charity. "Our History." <https://missionariesofcharity.org/about-us/our-history/> (access 17.10.2025).
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf> (access 21.10.2025).
- Riyanto, Armada. "Sekilas Tentang Dokumen-Dokumen Ajaran Sosial Gereja," *Iman Katolik: Media Informasi & Sarana Katekese*.
https://www.imankatolik.or.id/ajaran_sosial_gereja.html (access 17.10.2025).
- Rochford, James. "Tax Collectors in Jesus' Day," *Evidence Unseen*.
<https://evidenceunseen.com/theology/historical-theology/tax-collectors-in-jesus-day>
 (access 21.10.2025).
- Sinaga, Nikson. Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi." *Kompas* (20 September 2025).
<https://www.kompas.id/artikel/harga-bahan-pokok-melambung-tinggi-dirut-bulog-turun-ke-pasar-pasar-di-sumut> (access 19.10.2025).
- Sulistyo, Dwi P., Stefanus Ato, et al. "Pengeroyokan di Awal Malam yang Berujung Penahanan 15 Jam," *Kompas* (30 September 2025). <https://www.kompas.id/artikel/pengeroyokan-di-awal-malam-yang-berujung-penahanan-15-jam> (access 21.10.2025).
- Sumarni. "Anggota DPRD Bebizie Flexing Liburan Mewah di Eropa, Isu Jadi Ani-Ani Pejabat Diungkit," *Suara.com* (26 Agustus 2025).
<https://www.suara.com/entertainment/2025/08/26/152002/anggota-dprd-bebizie-flexing-liburan-mewah-di-eropa-isu-jadi-ani-ani-pejabat-diungkit> (access 21.10.2025).

- Susanta, Yohanes K. "Dosa Pemimpin Israel dan Eksesnya bagi Kehidupan Umat Menurut Amos 5," *Track: Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi, dan Entrepreneurship* 2, no. 01 (2023). <https://ejurnal.stepsmg.ac.id/home/article/download/34/61/298> (access 21.10.2025).
- Susanto, Agus. "Pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak," *Kompas* (29 Agustus 2025). <https://www.kompas.id/artikel/pemakaman-affan-kurniawan-di-tpu-karet-bivak> (access 21.10.2025).
- Tim Detik Kalimantan. "Joget hingga Tunjangan, Ini Sederet 'Aksi' Anggota DPR yang Tuai Kritikan," *Detik Kalimantan* (25 Agustus 2025). <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8077301/joget-hingga-tunjangan-ini-sederet-aksi-anggota-dpr-yang-tuai-kritikan> (access 20.10.2025).
- Tim Detikcom. "Saat Kardinal Suharyo Kutip Paus hingga Nasaruddin di Momen Paskah," *Detiknews* (20 April 2025). <https://news.detik.com/berita/d-7877533/saat-kardinal-suharyo-kutip-paus-hingga-nasaruddin-di-momen-paskah> (access 28.10.2025).
- Wicaksono, P. dan Intan S. "Tujuh Orang Tewas dalam Demonstrasi Agustus 2025, Siapa Saja Mereka?" *Tempo* (1 September 2025). <https://www.tempo.co/politik/tujuh-orang-tewas-dalam-demonstrasi-agustus-2025-siapa-saja-mereka--2065432> (access 20.10.2025).